

**PERAN EUROPEAN CENTER FOR CONSTITUTIONAL AND HUMAN RIGHTS
(ECCHR) DALAM MENANGANI SEXUAL AND
GENDER-BASED VIOLENCE (SGBV) DI SURIAH
TAHUN 2020**

Oleh:

Penulis : Muhammad Syachdan Maulana, 1801125161

(Email : syachdanmuhammad@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Umi O Retnaningsih, MA

Bibliografi : 11 Buku, 8 Jurnal, 13 Dokumen, dan 26 Website

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru, 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Sexual and Gender-Based Violence (SGBV) is a serious and prolonged case in Syria. This phenomenon also involves armed people and even people of high rank and position. The world's international organizations, both IGOs and NGOs, have tried to help solve the problem of violence based on gender. This paper will describe how the strategy of the European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) was successful in punishing two Syrian officials who committed gross human rights violations. Qualitative research is applied to answer the strategy used by ECCHR through secondary data. Documents from books, official publications such as the ECCHR annual report, journals, twitter, and articles from news worthy of trust. The theory of the Transnational Advocacy Network from Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink will be used to analyze the strategies applied. The results showed that the strategies of Information politics, Symbolic Politics, Leverage Politics and Accountability Politics had been used. ECCHR and its partners conduct criminal complaints in German courts using the principle of international jurisdiction. The ECCHR has successfully convicted two former Syrian officials involved in the Sexual and Gender-Based Violence incident.

Keywords : Information politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, Accountability Politics, European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Transnational Advocacy Networks (TAN), Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).

1. PENDAHULUAN

Dunia hubungan internasional diwarnai banyak isu-isu. Hal ini dikarenakan interaksi internasional merupakan sesuatu yang luas dan hubungan internasional memiliki banyak sekali fenomena yang membuat ilmu ini menarik untuk diteliti. Dalam hubungan internasional, ada isu yang dikenal dengan *human security*. Isu ini merupakan isu yang tidak baru meskipun pada awalnya isu ini belum disadari sebagai ancaman sebelum perang dingin dikarenakan fokus *security* pada masa itu adalah militer dan ancaman dari negara lain. Munculnya perang dingin membuat opini-opini baru muncul mengenai *human security* yang *scope*-nya tidak terbatas pada militer saja, namun datang dari masyarakat. Definisi *human security* adalah “*to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedom and human fulfilment*”¹.

Suriah sebagai negara yang berkonflik membuat banyak aspek di negaranya terganggu. Konflik yang dimungkinkan terinspirasi oleh adanya pergolakan di Tunisia pada 14 Januari 2011 yang menyebabkan turunnya Presiden Zainal Abidin bin Ali, dan pergolakan lainnya seperti yang terjadi di Mesir pada 1 Februari 2011 yang berakibat turunnya Presiden Hosni Mubarak. Adapun bunyi slogan yang mengakibatkan penangkapan di Suriah adalah “Rakyat menginginkan rezim turun”.² Banyak Organisasi

Internasional yang turut serta membantu Suriah. Baik itu berupa memberikan bantuan seperti makanan, pakaian, edukasi dan lainnya. Namun selain masalah tersebut, ada permasalahan yang tampaknya tidak sejelas permasalahan lain namun efek dari permasalahan itu bisa berjangka panjang. Permasalahan tersebut adalah *Sexual and Gender-Based Violence* atau disingkat SGBV.

ECCHR adalah *Inter Non-Governmental Organization* yang memanfaatkan yurisdiksi internasional yang dilakukan oleh pengadilan Jerman dengan artian bahwa pengadilan Jerman berhak mengadili penjahat atau tersangka negara lain. ECCHR adalah organisasi internasional yang bergerak dibidang hukum. INGO ini memiliki tujuan untuk menjamin tegaknya hak asasi dan hak sipil masyarakat diseluruh dunia. Untuk membantu mencapai misinya, organisasi ini memiliki banyak partner yang tersebar di seluruh dunia. Dijumlahkan hingga pada tahun 2017 saja, ECCHR sudah memiliki 153 organisasi dan instansi yang tersebar di seluruh dunia.³

Kasus yang ditangani ECCHR adalah berupa kasus pelanggaran HAM berat yang meliputi pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan bahkan hingga pengeboman ke fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan pasar yang dilakukan oleh pemimpin brutal dan kelompok bersenjata. Untuk berperan dalam penegakan HAM di daerah-daerah yang sedang dilanda musibah tersebut, mereka bekerjasama dengan pengacara dan organisasi di seluruh dunia.

ECCHR telah menyentuh permasalahan di Suriah. Dengan mitranya, mereka melaporkan orang

¹ Human Security Unit United Nation, *Human Security in Theory and Practice; An Overview of the Human Security Concept and the UN Trust Fund for Human Security*”.

Dapat ditelusuri di:
<http://www.un.org/humansecurity/sites/www.un.org/humansecurity>.

² Siti Muti'ah, “Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-

Islamisme?” Jurnal CMES V:1, Juli - Desember 2012 hlm. 5.

³ <https://www.ecchr.eu/en/ecchr/anniversary/>

dengan pangkat tinggi yang memiliki kekuasaan di pemerintahan Bassar Assad. Pengadilan yang dilakukan di Koblenz, Jerman terhadap Anwar R yang merupakan kepala unit investigasi di pusat penanganan Damaskus atau dikenal juga dengan Branch 251 dan Eyad A yang merupakan anggota unit investigasi. Dengan yurisdiksi internasional yang berlaku di Jerman berdasarkan *German Code for Crime against International Law* atau CCAIL pada 2002, kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu dan satu negara saja namun seluruh komunitas internasional. Tersangka menolak semua tuduhan maka pemeriksaan yang memerlukan waktu panjang membuat penanganan kasus ini sulit untuk melihat akhirnya.

Tulisan ini menarik untuk diteliti karena menyajikan sesuatu yang kurang disorot dalam perang, yakni bagaimana kekerasan seksual terselip dalam konflik seperti yang terjadi di negara Suriah. Tanpa menganggap remeh korban kematian, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa masih ada teror dibalik informasi pembantaian, adu tembak, bahkan hingga kebrutalan ISIS. Teror melukai fisik serta psikologis korban serta untuk pemulihannya juga tidak mudah serta memakan waktu yang lama.

Penulis perlu menjawab asumsi-asumsi dan pertanyaan mengapa penulis meneliti permasalahan gender padahal penulis disini adalah seorang laki-laki. Pertama, tulisan ini membahas mengenai kekerasan yang terjadi di negara Suriah. Semua orang harus sepakat bahwa memberantas kekerasan dalam aspek apapun itu adalah tugas semua orang serta tidak terbatas pada satu gender dan jenis kelamin saja. Dapat dilihat, bahwa tulisan ini tidak membahas perdebatan gender sebagai

identitas secara panjang lebar namun yang penulis coba paparkan adalah mengenai kekerasan seksual di Suriah. Kedua, penulis mengangkat sebuah organisasi yang bergerak dibidang penegakan HAM yang memiliki koneksi diseluruh dunia. Organisasi ini patut diberi apresiasi melihat keterlibatan mereka membantu memberantas pelanggaran HAM yang tersebar diseluruh dunia.

Kekerasan seksual adalah permasalahan serius yang penanganannya cukup sulit. Kekerasan ini bisa mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologi korban. Kekerasan seksual dapat berdampak pada korban seperti depresi, fobia, mimpi buruk serta kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu lama. Bahkan untuk korban yang memiliki trauma cukup berat bisa menyeret kepada bunuh diri.⁴

Suriah adalah salah satu anggota dari *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* yang disingkat sebagai CEDAW sejak tanggal 28 Maret 2003. Dalam Hukum Internasional CEDAW adalah Konvensi internasional yang bergerak di bidang hak asasi perempuan. Konvensi ini mewajibkan anggotanya untuk mengimplementasikan amanat dari konvensi tersebut mengenai pemenuhan hak asasi perempuan. Negara diwajibkan untuk tidak hanya menerapkan ketentuan yang ada di dalam CEDAW, namun juga harus dapat menerapkan sanksi kriminalitas terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap wanita.⁵

⁴ Sulistyaningsih, E., & Faturochman (2002). *Dampak sosial psikologis perkosaan*. *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

⁵ Ridhana Swastika Chresna, 2012, *Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) terhadap Kasus Kekerasan Seksual*

Kekerasan dilakukan untuk menanamkan rasa takut terhadap korban. Hal ini dilakukan oleh kelompok utusan dari pemerintah dengan melakukan pemerkosaan dan pelecehan selama operasi, penggerebekan dan penangkapan kelompok oposisi. Selama penahanan, tindak kekerasan seksual ini adalah bentuk serangan yang semakin meluas dan sistematis dan korban disini adalah masyarakat sipil. Kejahatan kekerasan seksual jika dikaji melalui perspektif kriminologi mengarah kepada motif serta perilaku. Adapun motif tersebut adalah pemuasan nafsu seksual.⁶

Dari latar belakang dan deskripsi masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan pertanyaan penelitian adalah **“Bagaimana peran (European Center for Constitutional and Human Rights) dalam menangani Sexual Gender-Based Violence di Suriah tahun 2020?”**

2. Kerangka Teori

Perspektif Pluralisme

Penelitian ini menggunakan perspektif Pluralisme. Pluralisme adalah perspektif yang mengakui keberagaman aktor dalam sebuah hubungan internasional khususnya kepada aktor non-negara dan mengamati perubahan apa saja yang dapat dibawa oleh aktor tersebut dalam hubungan internasional.

Pluralisme dapat dijelaskan pada dua cara yakni secara luas dan sempit.⁷

di Wilayah Shan Myanmar pada 1996-2001, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, hlm. 15.

⁶ Ni Made Dwi Kristiani, 2014, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. 3 hlm. 375

⁷ Andrew Heywood. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan, hlm.82

Secara luas, pluralisme diartikan sebagai sebuah pandangan yang meyakini keberagaman. Sedangkan secara sempit pluralisme dipahami sebagai teori yang menjelaskan distribusi political power. Teori ini menjelaskan bahwa political power terdistribusi pada seluruh kelompok masyarakat.

Pluralisme memiliki beberapa asumsi dasar sebagai berikut:

- a) Aktor bukan negara adalah entitas penting dan faktor penting dalam politik dunia.
- b) Negara bukan aktor utama.
- c) Pluralis menganggap negara bukan aktor rasional.
- d) Mendukung agenda yang lebih luas dari politik internasional.

Aktor non-negara kini memiliki keterlibatan dan perkembangan yang amat signifikan. Keberagaman dari aktor bukan negara ini sangat banyak mulai dari organisasi internasional non-negara, *multinational corporation*, kelompok-kelompok kepentingan bahkan kepada individu. Hal ini membentuk jaringan yang menembus batas negara yang memperkuat peran para aktor dalam memberikan dampak melalui pengaruhnya dalam dinamisme hubungan internasional.

Negara sebagai aktor penting diisi oleh banyak elemen penting didalamnya. Pluralisme memandang bahwa keputusan yang lahir dalam setiap negara merupakan hasil lobi dari elemen yang berperan didalamnya. Dalam hal tersebut negara tidak dapat dikatakan aktor rasional karena ada proses lobi tersebut.

Selain itu, menurut pluralisme isu non-tradisional adalah isu yang lebih penting untuk dibahas seperti ekonomi ketimbang isu tradisional seperti keamanan. Dalam sistem internasional pluralisme berpandangan bahwa

distribusi power juga terdapat pada aktor non-negara dan tidak dibatasi dalam aktor negara saja. Pandangan pluralisme dapat memberi efek baik untuk terlaksananya akomodasi kepentingan yang belum terakomodasi dalam kemelut politik internasional yang dijalankan oleh negara. Pluralis tidak menganggap negara sebagai aktor yang terabaikan namun pluralis juga menekankan bahwa politik internasional juga terpengaruh oleh kelompok dan kepentingan.⁸

1.4.2. *Transnational Advocacy Network*

Politik dunia pada akhir abad kedua puluh selain melibatkan negara, banyak aktor non-negara yang berinteraksi satu sama lain, dengan negara, dan dengan organisasi internasional. Interaksi ini terstruktur dalam hal jaringan, dan jaringan transnasional semakin terlihat dalam politik internasional. *Advocacy Network* berperan sangat signifikan secara domestik maupun antar negara. Dengan membangun hubungan baru di antara para aktor dalam masyarakat sipil, negara, dan organisasi internasional, mereka melipatgandakan saluran akses ke sistem internasional. Di bidang isu seperti lingkungan dan hak asasi manusia, mereka juga menyediakan sumber daya internasional bagi aktor baru dalam perjuangan sosial dan politik domestik. Jaringan advokasi transnasional terus berkembang, dan memiliki tujuan untuk mengubah perilaku negara dan organisasi internasional. Secara bersamaan, para aktor dengan prinsip mereka mencoba “membangkitkan” isu-isu untuk dapat dipahami oleh banyak orang supaya dapat menarik perhatian dan mendorong tindakan, dan untuk “menyesuaikan”

⁸ Op.cit, Heywood. Hlm 132

dengan tempat-tempat institusional yang cocok dan mendukung agenda mereka.⁹

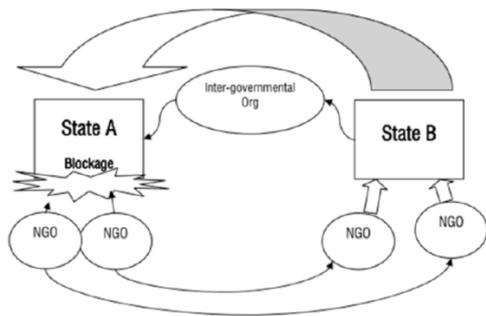
Organisasi Internasional telah terbukti banyak memberikan dampak positif dalam memecahkan banyak masalah yang dialami negara-negara. Organisasi Internasional dan perannya dalam membantu negara adalah sebuah cerminan bahwa manusia hidup harus saling membantu. Samuel J. Barkin berpendapat bahwa peran dari Organisasi Internasional ini dapat terlihat dari segi hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan.¹⁰

Menurut *Transnational Advocacy Network* atau disingkat TAN ada tujuh aktor utama yang dapat memberikan kontribusi. Adapun aktor tersebut adalah *Non-Governmental Organization*, *social movement* lokal, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan peneliti, bagian dari organisasi regional bahkan antar negara, serta badan eksekutif. Tidak ada aturan bahwa semua aktor tersebut harus terlibat baru menjadikan berjalannya proses TAN tersebut.

Menurut Keck dan Sikkink, terdapat sebuah pola dalam TAN yang dinamakan dengan *Boomerang Pattern*. TAN sering mendapat kesulitan untuk masuk kedalam area politik domestik sebuah negara, maka dari itu melalui jaringan serta koneksi mereka yang tersebar diseluruh dunia akan sangat membantu mereka dalam menghadapi persoalan.

⁹ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, 1998, *Activists beyond Borders ; Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press, hlm. 1.

¹⁰ Samuel Barkin, 2006, *International Organization Theories and Institutions*, New York, Palgrave MacMillan. Hlm 80



Gambar 1.1 *Boomerang Pattern*.
 Sumber: Keck and Sikkink, *Activist Beyond Border; Advocacy Networks in International Politics* (1998)

Pola interaksi *Boomerang Pattern* ini menggambarkan bagaimana pergerakan strategi TAN. Negara target yang membuat organisasi domestik kesulitan dalam mengambil akses ke negara sendiri akan membangun jaringan (*network*) dengan negara luar. Setelah mendapat dukungan dari aktor internasional lainnya, hal ini akan mempermudah jaringan dalam memperjuangkan isu serta mempengaruhi pemerintahnya dari luar.

Menurut teori Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink ada 4 strategi yang dapat digunakan TAN.¹¹ Adapun strategi tersebut adalah:

a. Information Politics

Informasi mengikat anggota *network* agar tetap bersama-sama dan penting untuk efektivitas jaringan. Banyak pertukaran informasi seperti panggilan telepon, komunikasi email dan faks, pamflet, dan buletin. Mereka saling bertukar informasi yang tidak akan tersedia dari sumber yang mungkin tidak terdengar dari suatu region atau wilayah, dan mereka harus membuat informasi ini dapat dipahami dan berguna bagi para aktivis dan

¹¹ Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink, op. cit, hlm. 17

publik yang mungkin jauh secara geografis dan/atau sosial.

b. Symbolics Politics

Aktivis akan membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan yang meyakinkan dengan peristiwa simbolis yang kuat. Hal ini juga nantinya akan menjadi katalis atau faktor yang mempercepat pertumbuhan antar jaringan. Simbolik diinterpretasikan sebagai proses persuasi atau ajakan yang dilakukan oleh *network* agar membangun kesadaran dan memperluas konstituen mereka.

c. Leverage Politics

Aktivis dalam jaringan advokasi sangat memperhatikan efektivitas politik. Definisi efektivitas mereka sering kali mencakup beberapa perubahan kebijakan oleh “pelaku sasaran” seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, atau swasta. Untuk membawa perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Untuk mendapatkan pengaruh, jaringan mencari pengaruh (kata itu sering muncul dalam wacana organisasi advokasi) atas aktor yang lebih kuat. Dengan memanfaatkan institusi yang lebih kuat, kelompok-kelompok lemah memperoleh pengaruh jauh melampaui kemampuan mereka untuk mempengaruhi praktik-praktik negara secara langsung. Identifikasi pengaruh material atau moral merupakan langkah

strategis yang penting dalam kampanye jaringan.

d. Accountability Politics

Network sangat berusaha untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk secara terbuka mengubah posisi mereka dalam isu-isu sosial. Maka mereka akan menjaga dan mengawasi pemerintah agar mempertahankan kebijakan yang sesuai dengan tujuan mereka.

3. METODE

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membahas dan menganalisa permasalahan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian ini membutuhkan data yang memerlukan penjelasan spesifik dan rinci mengenai isu yang dikaji. Metodologi adalah prosedur yang dibutuhkan oleh seorang peneliti dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuat pengetahuan yang nantinya akan menjadi pegangan hidup para ilmuwan tidak datang begitu saja, akan tetapi diperoleh melalui serangkaian tahapan yang disebut sebagai prosedur¹². Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan peneliti sebagai alat penelitian yang melakukan analisis data secara induktif dan lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan

¹² Umar Suryadi Bakri, “Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Tradisional dan Sainifik” dalam *Metodologi Ilmu Hubungan Internasional: Perdebatan paradigmatis dan Pendekatan Alternatif*, eds., Asrudin, Mirza Jaka Suryana, dan Musa Maliki (Malang: Intrans, 2014), 17.

subjek penelitian.¹³ Metode deskriptif dipilih karena metode ini adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, subjek, kondisi, sistem pemikiran maupun kelas peristiwa. Tujuan penelitian deskriptif ini ialah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang akan dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui metode analisis dokumen, dimana kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam literatur yang ada seperti buku, majalah, artikel, catatan, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

4. HASIL DAN PENELITIAN

Information Politics

Information politics dalam *Transnational Advocacy Networks* (TAN) merupakan aspek penting untuk mendukung gerakan jaringannya. Informasi yang didapatkan merupakan informasi yang sulit didapatkan dan digali melalui cara-cara seperti testimoni dan kesaksian orang-orang terdampak. Informasi tersebut nantinya akan disalurkan kepada organisasi lain untuk digunakan oleh para aktivis yang tersebar di belahan dunia lain. Pentingnya informasi ini adalah sebagai instrumen untuk membujuk orang-orang dan mendorong agar mereka mengambil tindakan.¹⁴

¹³ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (12th, Cetaka ed.). Bandung: CV Alfabeta.

¹⁴ Keck dan Sikkink, op.cit, hlm 96.

Pengaduan pidana adalah langkah awal dan merupakan bentuk dari *information politics*. Pengaduan pidana yang dilakukan ECCHR dan rekannya berasal dari kesaksian 7 saksi, diantaranya adalah empat perempuan dan tiga laki-laki. Semua saksi tersebut merupakan orang yang selamat dan menyaksikan kekerasan serta penyiksaan seksual dan berbasis gender di empat fasilitas penahanan yang dijalankan oleh Dinas Intelijen Angkatan Udara di kota-kota Damaskus dan Hama antara April 2011 dan Oktober 2013. Penahanan mereka terjadi pada waktu yang berbeda dan berlangsung selama periode yang berbeda antara beberapa hari sampai beberapa bulan. Semua saksi, kecuali dua orang yang tidak dapat melakukan perjalanan ke Jerman saat masa pengerjaan laporan tinggal di Jerman dan bersedia memberikan kesaksian di hadapan otoritas kejaksaan Jerman.

Information politics adalah kemampuan jaringan menyebarkan informasi dengan cepat agar bisa digunakan secara politis dan kredibel terhadap sesuatu yang memiliki pengaruh paling berdampak. Dalam TAN informasi adalah peran penting untuk memperkuat jaringan. Keck dan Sikkink juga mengatakan bahwa media adalah bagian penting dalam *information politics*.¹⁵ Diantara cara untuk mencapai tujuan menjangkau masyarakat lebih luas adalah dengan pers. Jurnalis yang bekerja di media akan membantu menuliskan dan menyalurkan informasi mereka.

Perhatian masyarakat akan cepat didapati melalui media. Masyarakat internasional beraksi agar segera diberikan keadilan terhadap korban yang mendekam di pusat penahanan Syria. Demonstrasi di Turki serta

berbagai tulisan di media sosial mendukung aksi ini. ECCHR juga kerap menyuarakan bahwa SGBV adalah fenomena yang tidak di rilis media secara lugas dibanding dengan serangan penembakan dan ISIS. Wacana membawa bahwa isu SGBV adalah fenomena nyata namun kurang populer sudah berjalan.

Ada beragam bentuk SGBV yang dialami para pelapor. Mulai dari saat pemeriksaan keamanan dan pengeledahan area intim seperti menyentuh payudara dan area kelamin, ketelanjangan paksa adalah hal yang sering kali terjadi saat para korban tiba di pusat penahanan. Pemerksaan dan ancaman pemerksaan dan pelecehan seksual sering kali terjadi dalam perjalanan ke toilet. Hal hal seperti sengatan listrik yang menargetkan area kelamin serta bahasa bersifat seksual dan pertanyaan yang mengganggu tentang kehidupan seks.

Saksi 107 merupakan salah satu orang yang mengalami kejadian tersebut secara langsung. Ia menceritakan bahwa ia dalam keadaan hamil saat ia ditangkap pada September 2012. Ia dibawa ke pusat penahanan Hama milik Dinas Intelijen Angkatan Udara Suriah dan ditahan selama lebih dari satu bulan dalam sel isolasi. Disana ia melaporkan bahwa para tentara kerap menginterogasinya dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai aspek seksual dengan mantan suaminya. Ini merupakan bentuk pelecehan yang korban alami. Sebulan setelahnya ia di pindahkan ke Pusat Penahanan Bandara Marij al-Sultan dekat dengan Damaskus yang dikendalikan oleh Dinas Intelijen Angkatan Udara Suriah. Dia menghabiskan beberapa hari di pusat penahanan di lokasi bandara di mana dia melaporkan telah melihat banyak mayat tahanan. Suatu malam, dia

¹⁵ Ibid, hlm. 95.

diperkosa secara brutal dalam perjalanan ke toilet.

Saksi 107 dilaporkan telah dibawa ke Cabang Investigasi al-Mezzeh. Disinilah aksi penyiksaan selama sesi interogasi kerap terjadi menurut laporan korban. Pendarahan vaginanya yang tidak kunjung berhenti membuat ia harus menjalani operasi paksa di rumah sakit militer tanpa pereda nyeri. Saksi 107 akhirnya keguguran. Selama lebih dari empat bulan masa tahanan, ia melihat adanya bubuk biru yang ditumbuk halus setiap hari. Bubuk tersebut mengandung zat yang bersifat adiktif dan bisa menghilangkan kesadaran. Setelah mengonsumsi bubuk tersebut dilaporkan bahwa tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan teriakan tahanan lain yang diinterogasi tidak terdengar lagi. Saksi 107 mengatakan bahwa ia pernah diinterogasi oleh Jamil Hassan langsung. Ia telah melaporkan kepada Jamil Hassan mengenai kekerasan yang dialaminya namun Jamil Hassan tidak peduli dan hanya mementingkan informasi yang ia bisa berikan saja.¹⁶

Informasi dari aktor TAN lain membantu proses pengaduan pidana yang ECCHR kerjakan. Nama aktor tersebut adalah *Caesar Files Group*. Mereka berhasil mengumpulkan informasi berupa bukti berupa foto dan data mengenai penyiksaan sistematis yang terjadi di pusat penahanan yang dikelola oleh Dinas Intelijen Suriah. Selama beberapa tahun, kelompok orang yang mendukung pembelot polisi militer Suriah yang dikenal sebagai "Caesar" telah memperoleh ribuan foto tahanan yang disiksa dan dibunuh di fasilitas penahanan pemerintah Suriah dan telah menyelundupkan gambar tersebut keluar dari Suriah. Dalam pengaduan kriminal pada tahun 2017,

¹⁶ ibid

ECCHR bekerja sama dengan Caesar Files Group melawan pejabat senior dari dinas intelijen Suriah dan polisi militer tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Seorang perwakilan dari Caesar Files Group juga memberikan kepada Jaksa Federal satu set gambar dan metadata beresolusi tinggi. Metadata tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi foto-foto dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai kejadian yang sebenarnya terjadi di pusat penahanan Suriah. Dengan adanya bukti berupa foto yang jelas ini akan membuka langkah baru untuk penelitian lebih lanjut kedepan.

Foto yang diperoleh dari Caesar ini adalah bukti besar dalam mengungkap penyiksaan di Suriah. Diantara pembuktian yang bisa didapat adalah dari foto kondisi mayat yang terdapat luka-luka memberikan indikasi bahwa positif adanya penyiksaan dan para tahanan di pusat penahanan tersebut yang kemudian dibunuh. Foto dengan jumlah yang banyak itu menunjukkan prosedur birokrasi yang diikuti dengan tingkatnya dan pola sistematis dari bentuk penyiksaan di Suriah.¹⁷

Gambar dari *Caesar Files* tersebut diperoleh dari Mei 2011 hingga Agustus 2013. *Caesar Files Group* mengatakan bahwa dari total 26.948 arsip, lebih dari setengahnya menunjukkan mayat tahanan yang sudah meninggal di fasilitas penahanan tersebut. Foto-foto itu diambil

¹⁷ ECCHR, 2017, *Photographs and data from the Caesar-File Group; Evidence of systematic torture in detention facilities of the Syrian intelligence services and military police*, ecchr.eu. dapat ditelusuri di https://www.ecchr.eu/fileadmin/Hintergrundberichte/Background_Syria_Torture_CaesarFiles_GermanyCriminalComplaint_ECCHR_August_2019.pdf. Hlm, 2.

sebagai bagian dari prosedur internal polisi militer Suriah. Menurut Caesar, mayat baru dibawa ke rumah sakit militer hampir setiap hari. Dia mengatakan bahwa dokter forensik, akan langsung mencatat penyebab kematian berupa gagal jantung dan kesulitan bernafas tanpa melakukan pemeriksaan apa pun. Berbagai sumber menunjukkan bahwa mayat-mayat dalam foto itu memiliki nomor yang berbeda. Satu nomor menunjukkan lembaga atau departemen di mana almarhum terakhir ditahan, nomor lain menunjukkan nomor tahanan yang ditetapkan oleh departemen dinas intelijen terkait. Para dokter forensik kemudian akan memberikan satu nomor lagi yang akan ditulis pada selebar karton dan diangkat di samping tubuh saat foto itu diambil.

Sebagian besar foto menunjukkan mayat pria muda berusia antara 20 hingga 40 tahun. Kemudian ada juga gambar mayat orang tua serta satu wanita dan sekitar 100 anak yang berusia dibawah 18 tahun. Metadata yang dilampirkan pada file gambar umumnya berisi informasi tentang model kamera yang digunakan untuk mengambil foto. Dalam banyak kasus, ini juga menunjukkan nomor seri perangkat. Informasi ini sangat berharga untuk verifikasi foto. Catatan metadata sering juga mengungkapkan nomor hash yang dapat digunakan untuk memverifikasi bahwa gambar tersebut adalah foto asli dan bukan pemalsuan.

Metadata berisi informasi lebih banyak dari sekedar konten gambar saja. Jika sistem GPS kamera menyala pada saat gambar diambil, metadata dapat digunakan untuk membantu menentukan di mana foto itu diambil. Metadata juga mencakup informasi tentang waktu yang tepat saat foto itu diambil dan waktu saat gambar itu disimpan di perangkat lain. Dalam

kasus di mana fotografer terdaftar sebagai pengguna kamera, metadata juga akan membantu mengidentifikasi fotografer.

Media berperan sebagai penyebar informasi berdasarkan peristiwa tersebut. Informasi tersebut tersebar dengan cepat dan dibuat oleh berbagai macam portal berita. Diantaranya ada berita dengan judul “*Germany issues international arrest warrant for Syrian intelligence chief – reports*” yang diliput oleh Deutsche Welle.¹⁸ Kemudian artikel dengan judul *The Syrian war crime suspects who could be brought to justice* yang dibuat oleh *Middle East Eye*¹⁹. Ada juga artikel berita dengan judul *How a German court is trying to bring Syrian war criminals to justice* yang berisi analisis seorang jurnalis terhadap peristiwa di Suriah yang dapat dilansir di portal berita Al-Monitor.²⁰ Berita tersebut juga menyebar hingga ke media Indonesia, artikel berita yang dapat diakses di halaman detik yang mengutip berita dari DW dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia membantu penyebaran informasi tersebut. Artikel dengan judul *Aktivis Jerman Ajukan Rezim Suriah ke*

¹⁸ DW, 2018, *Germany issues international arrest warrant for Syrian intelligence chief – reports*. Dapat ditelusuri di <https://www.dw.com/en/germany-issues-international-arrest-warrant-for-syrian-intelligence-chief-reports/a-44132109>

¹⁹ James Reinl, 2017, *The Syrian war crime suspects who could be brought to justice*, *Middle East Eye*. Dapat ditelusuri di <https://www.middleeasteye.net/news/syrian-war-crime-suspects-who-could-be-brought-justice>.

²⁰ Elizabeth Hagedorn, 2020, *How a German court is trying to bring Syrian war criminals to justice*, *Al-Monitor*. Dapat ditelusuri di: <https://www.al-monitor.com/originals/2020/04/syria-war-crimes-trial-germany-damascus-prison.html#ixzz7LTtYUqN>.

Pengadilan Atas Kekerasan Seksual²¹ dan masih banyak yang lainnya. Dengan adanya penyebaran informasi ini memunculkan adanya aktivisme transnasional dengan cepat dan kompleks.

Taktik *Information Politics* dilanjutkan dengan adanya aktivisme yang dilakukan organisasi lokal Suriah. Hal ini menguntungkan bagi para aktivis yang bergerak dibidang HAM karena bisa mendapatkan jalan keluar untuk menangkap para pelanggar HAM agar diadili karena pengadilan Jerman adalah solusi ketiga setelah pengadilan di ICC. Namun ICC tidak memiliki yurisdiksinya terhadap pengadilan Suriah dikarenakan negara Suriah bukan anggota ICC. Solusi kedua adalah melalui *United Nations Security Council* yang juga tidak bisa dilanjutkan dikarenakan Rusia dan Cina melakukan veto. ECCHR yang berpusat di Berlin Jerman memberikan keuntungan dari segi tempat penyelenggaraan pengadilan. Dengan penyebaran informasi ini diharapkan muncul kesadaran mengenai urgensi dari isu yang akan diadvokasikan.

Media dan juga halaman web dari para aktor yang berperan dalam isu ini tetap memberikan informasi mengenai perkembangan pekerjaan mereka. Kontribusi media dengan mudahnya mengakses informasi bisa dilakukan oleh siapa saja dan bisa dimana saja. Selain oleh masyarakat umum, media juga membantu para aktor yang berperan untuk memperluas legitimasi mereka dan membantu memobilisasi informasi dengan

²¹ DW, 2020, Aktivis Jerman Ajukan Rezim Suriah ke Pengadilan Atas Kekerasan Seksual, Detik. Dapat ditelusuri di <https://news.detik.com/dw/d-5064865/aktivis-jerman-ajukan-rezim-suriah-ke-pengadilan-atas-kekerasan-seksual>

kelompok lintas negara yang bergabung dalam *Transnational Advocacy Network*.

Symbolic Politics

Strategi *symbolics politics* memiliki areanya tersendiri. Para aktor yang berperan dalam isu SGBV Suriah membingkai masalah dengan mengidentifikasi dan memberikan penjelasan untuk peristiwa simbolik yang kuat sehingga bisa dijadikan pendorong dan motivasi dalam perkembangan jaringan. *Symbolics politics* diartikan sebagai kemampuan para aktor dalam TAN menciptakan simbol, aksi maupun narasi yang sesuai dengan situasi atas masalah yang akan diadvokasikan untuk penonton, terutama yang jauh secara geografis.

Ada banyak macam strategi *symbolics politics* yang terjadi. *Symbolics politics* yang membantu ECCHR dalam kerjanya sangat jelas dilihat saat adanya pameran *Caesars files* di markas besar PBB. Foto-foto bukti kekejaman dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Suriah dipamerkan dengan dukungan dari banyak negara besar seperti Turki, Inggris, Prancis, Qatar dan juga Amerika Serikat.²²

Pameran ini dilakukan sebagai cara untuk mendapatkan simpati masyarakat dan memberikan bukti jelas bahwa peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Suriah merupakan hal nyata dan terstruktur. Dalam kampanye di media sosial, tagar paling terkenal sebagai simbol dukungan terhadap keadilan di Suriah adalah #Justice4Syria. Tagar ini digunakan

²² Mustafa Caglayan, 2015, Gruesome photos of torture from Syria on display at UN, AA. Dapat ditelusuri di <https://www.aa.com.tr/en/politics/gruesome-photos-of-torture-from-syria-on-display-at-un/68036>

oleh banyak aktivis dalam menyebarkan pendapat dan informasi mengenai segala kejadian pelanggaran HAM di Suriah. Di media sosial seperti twitter, tagar #Justice4Syria telah banyak di *tweet* maupun *retweet* oleh banyak orang sebagai bukti bahwa melalui tagar ini penyebaran mengenai urgensi isu ini sangat cepat.

Aksi demonstrasi juga termasuk dalam kategori indikator *symbolic politics*. Adanya demonstrasi di Turki yang menuntut dibebaskannya para tahanan di pusat penahanan Suriah adalah salah satu contohnya. Demonstrasi yang dilakukan bertepatan saat Hari Wanita Internasional itu diatur oleh *International Conscience Movement, IHH Humanitarian Relief Foundation* yang berada di Istanbul dan organisasi lainnya yang memiliki tuntutan serupa bahwa mendesak agar segera dibebaskannya wanita dan anak-anak dari penjara pemerintahan Bassar Assad.

Demonstrasi ini dilakukan serentak dengan 110 negara lainnya di Dunia. Perwakilan dari setiap organisasi melakukan konferensi pers bersama dengan tema “*We are getting together for the freedom of captive women and children in Syria*”²³. Dilaporkan pada Maret 2018, ada 55 konvoi bus yang melakukan perjalanan tiga hari dari Istanbul ke Provinsi Hatay bagian selatan yang dekat dengan perbatasan Suriah. Ada sekitar 10.000 wanita yang berunjuk rasa.

Konferensi internasional yang dilakukan The Conscience Movement dihadiri oleh 45 negara seperti Suriah, Inggris, Afrika Selatan, Ekuador, Qatar,

Ukraina dan lain-lain. Konferensi tersebut dihadiri oleh tokoh terkenal seperti Zwelivelile Mandlesizwe Dalibhunga Mandela yang merupakan cucu dari Nelson Mandela dan Ana Belen Marin Aguire merupakan anggota parlemen Ekuador serta anggota dari House of Lords Inggris. Jelas terlihat bahwa tujuan dari adanya konferensi tersebut adalah untuk menyebarkan dan memanggil masyarakat agar memperhatikan bahwa para wanita menderita dan dipenjara saat perang saudara Suriah. Tidak hanya sampai disana, para wanita ini juga diperkosa dan disiksa.

Gerakan tersebut didukung oleh lebih dari 200 NGO dan ribuan orang dari 110 negara. Statement yang diberikan dari gerakan tersebut adalah “lebih dari 3500 wanita Suriah ditahan sejak perang dimulai pada maret 2011. Kemudian bertambah hingga 7000 wanita tetap ditahan dipenjara tersebut. Wanita tersebut sering disiksa, diperkosa, dan dijadikan sasaran perilaku kekerasan seksual.”²⁴

Bentuk dari *symbolic politics* lainnya dapat dilihat dengan adanya film dokumenter mengenai bagaimana kejamnya rezim Bassar Assad. Film dengan judul *Bringing Assad To Justice* memproyeksikan bagaimana para aktivis mendapatkan data dan informasi untuk membawa para tersangka atau pelanggar terhadap penyiksaan dan kekerasan untuk segera diadili. Film ini di Sutradarai oleh Ronan Tynan dan rilis pada tahun 2021 dan premiernya di Berlin pada Selasa, 5 Oktober 2021. Dalam film dokumenter ini, Ronan Tynan menyorot para aktivis, mantan narapidana arsitek forensik di Inggris dan pengacara seluruh dunia dalam

²³ Murat Paksoy, 2019, Turkey; Rallies Held for Jailed Syrian women, children. AA. Dapat ditelusuri di <https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rallies-held-for-jailed-syrian-women-children/1413119>

²⁴ TRT World, 2019, Istanbul hosting meeting on jailed Syrian women. Dapat ditelusuri di <https://www.trtworld.com/turkey/istanbul-hosting-meeting-on-jailed-syrian-women-24300>

menghadapi orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan penjara Suriah dan para pemerintah yang mendukung adanya penyiksaan. Uniknya, film ini tidak menggambarkan bahwa aksi mengadili para pelanggar HAM Suriah bersifat mustahil, justru memproyeksikan tekad dan dendam. Film ini juga mendapatkan banyak penghargaan dan nominasi di banyak festival film. Diantaranya adalah pemenang dalam Toronto Film Magazine Festival kategori Best Feature Documentary, kemudian pemenang dalam La Independent Film Channel dengan kategori best feature documentary, dan pemenang dalam festival lain seperti New York Film Awards, Canne Indies Cinema Festival dan masih banyak yang lainnya. Film ini akan membawa pengaruh kepada masyarakat yang lebih luas dan akan memberikan keuntungan bagi aktor TAN dalam mencapai misinya.

Strategi *symbolic politics* dalam fenomena SGBV Suriah tersebut dinilai berhasil memberikan dampak signifikan dalam menyadarkan masyarakat serta mendorong pertumbuhan jaringan. *Symbolic politics* merupakan bagian dari proses persuasi ketika jaringan menciptakan kesadaran dan memperluas konstituensi. Pameran foto-foto Caesar, tagar sosial media, aksi unjuk rasa, dan juga adanya film dokumenter sudah lebih dari cukup bukti strategi TAN dalam peristiwa ini.

Leverage Politics

Aktivis dalam TAN sangat memikirkan tentang *political effectiveness*. Definisi *effectiveness* bagi TAN sering ditemui mencakup tentang perubahan kebijakan oleh pelaku sasaran seperti pemerintah, lembaga keuangan seperti Bank Dunia dan aktor privat seperti perusahaan multinasional.

Untuk membujuk perubahan kebijakan, jaringan perlu menekan dan membujuk aktor yang lebih kuat. Dalam hal ini, identifikasi mengenai *material leverage* dan *moral leverage* merupakan langkah strategis dalam TAN.²⁵

Material leverage biasanya berhubungan dengan uang atau barang namun berpotensi juga berupa suara dalam organisasi internasional, kantor-kantor dan manfaat lainnya. Isu HAM dapat dinegosiasikan karena pemerintah dan lembaga keuangan menghubungkan praktik HAM dengan bantuan militer dan ekonomi bahkan dengan hubungan diplomatik bilateral. Contohnya seperti di Amerika Serikat, organisasi HAM disana mendapatkan pengaruh dengan memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dengan informasi yang meyakinkan mereka untuk menghentikan bantuan militer dan ekonomi.²⁶

Sementara *moral leverage* lebih melibatkan "*mobilization of shame*" yang berarti dimana perilaku aktor sasaran diangkat ke sorotan pengawasan internasional. TAN mengarahkan *moral leverage* pada asumsi bahwa pemerintah menghargai pendapat baik orang lain sejauh jaringan dapat menunjukkan bahwa suatu negara melanggar kewajiban internasional atau tidak memenuhi klaimnya sendiri, mereka berharap untuk membahayakan kredibilitasnya untuk memotivasi perubahan dalam kebijakan maupun perilaku.²⁷

Material Leverage dapat dilihat dalam fenomena pelayangan surat tangkapan terhadap Jamil Hassan oleh pihak berwajib Jerman. Disini, proses penangkapan yang merupakan hasil dari persidangan yang berakhir pada terbuktinya Jamil Hassan dalam

²⁵ Keck dan Sikkink, op.cit, hlm. 21

²⁶ ibid

²⁷ Ibid, hlm. 22

melakukan pelanggaran HAM. Hal ini dinilai sebagai batu tandingan bagi banyak orang dalam mengadili fenomena SGBV dan bentuk kekerasan lainnya di Suriah.

Bentuk *material leverage* juga dapat dilihat melalui penayangan foto-foto yang diperoleh oleh Caesars Files Group di markas besar PBB yang disebutkan diatas pada bagian *symbolics politics*. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana file-file foto yang didapat oleh Caesars Files Group yang merupakan NGO dan bagian dari TAN bersama-sama ECCHR berhasil melebarkan pengaruhnya ke bagian PBB sebagai organisasi besar dan memiliki power besar.

Pengaduan kriminal sudah dilakukan sejak tahun 2017 melalui prinsip yurisdiksi internasional. ECCHR bekerjasama dengan pengacara asal Suriah yang bernama Anwar Al-Bunni yang merupakan bagian dari *Syrian Center for Legal Studies and Research*, Mazen Darwish dari *Syrian Center for Media and Freedom of Expression* dan juga *Caesars Files Group*. Pengaduan kriminal yang sama juga dilakukan di negara lain seperti Austria pada bulan Mei 2018, Swedia pada Februari 2019 dan Norwegia pada November 2019.²⁸

CEDAW sangat mengecam tindakan SGBV. Mereka melakukan adopsi terhadap resolusi 1820 tahun 2008 oleh dewan keamanan PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Demikian juga PBB yang secara tegas menanggapi bahwa kejahatan SGBV termasuk dalam kategori kejahatan internasional.²⁹ *International Criminal Justice* tidak menyediakan sarana legal untuk

mempersekusi kejahatan yang terjadi di Suriah, kemudian *International Criminal Court* atau ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap Suriah dikarenakan tidak adanya tandatangan terhadap Statuta Roma oleh ICC. Anggota permanen dewan keamanan PBB seperti Rusia dan China memveto resolusi untuk merujuk situasi se ICC.

Dewan HAM PBB membentuk Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang Republik Arab Suriah (UN CoI Syria) pada Agustus 2011 dalam resolusi S-17/1. Komisi tersebut memiliki mandat untuk menyelidiki semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional di Suriah sejak Maret 2011. Hal ini merupakan bentuk dari *Moral Leverage* yang diidentifikasi oleh TAN dalam fenomena Suriah.

Majelis Umum PBB membentuk *International, Impartial and Independent Mechanism* (IIIM) pada Desember 2016. Hal ini memiliki tujuan untuk membantu dalam Investigasi dan Penuntutan bagi mereka yang Bertanggung Jawab atas Kejahatan Paling Serious berdasarkan Hukum Internasional yang Dilakukan di Republik Arab Suriah sejak Maret 2011. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 huruf g dari Statuta Roma ICC, kekerasan seksual terkategori dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan namun harus adanya unsur-unsur yang terpenuhi. Pasal tersebut berbunyi:

“For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: ... (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form

²⁸ ECCHR, 2021, *Human Rights Violations In Syria: Torture Under Assad*.

²⁹ Mella Fitriatul Ilmi, 2019, *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*, Juris-Diction Vol. 2 No. 6. Hlm. 2199-2207

of sexual violence of comparable gravity;... ”

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi antara lain:

1. Pelaku melakukan tindakan SGBV terhadap seseorang bahkan lebih, dan mengakibatkan orang yang bersangkutan atau orang-orang untuk terlibat dalam SGBV. Intinya, target aktor disini benar-benar terlibat dalam SGBV.
2. Pelaku melakukan tindak kekerasan seksual dengan adanya elemen ancaman kekerasan dan pemaksaan. Elemen yang dimaksud dapat berupa memberikan rasa takut, paksaan, penahanan, memberikan tekanan psikologis, dan penggunaan kekuasaan terhadap target atau korban SGBV sehingga hilangnya elemen *consent* atau persetujuan.
3. Tindak SGBV tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis serta ditunjukkan terhadap kelompok penduduk sipil.³⁰

Fenomena SGBV Suriah telah mencentang ketiga poin dari statuta roma diatas. Bukti-bukti dan jejak SGBV yang telah diamati oleh banyak aktivis serta organisasi internasional lainnya memberikan kesimpulan bahwa benar positif para aktor yang terlibat benar-benar menggunakan kekuatannya untuk menebar ketakutan sehingga membenarkan perkataan bahwa fenomena SGBV Suriah adalah meluas

dan sistematis. Tindakan ini juga dilakukan tidak hanya oleh kelompok pemerintahan namun aktor lain yang terlibat dalam konflik Suriah sejak 2011. Para pelaku SGBV semakin menjadi sulit dilawan warga sipil mengingat posisi mereka yang memiliki kekuasaan dan senjata yang membekali mereka untuk menyelesaikan misinya.

Dewan HAM PBB untuk Suriah juga mengumpulkan bukti-bukti mengenai pelanggaran HAM. Hal ini bertujuan untuk membuat rekomendasi kepada negara anggota PBB untuk proses hukum dimasa mendatang. Dewan HAM PBB untuk Suriah bekerjasama dengan *International, Impartial and Independent Mechanism* dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, melestarikan, dan menganalisis bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter. Selain itu, mereka juga menyiapkan file untuk memfasilitasi dan mempercepat proses pidana yang adil dan independen di pengadilan Nasional, Regional maupun pengadilan Internasional.

Leverage politics yang terjadi di Suriah sangat terukur dan bisa dilihat. Material dan moral bisa dilihat dari rentetan peristiwa yang telah dipaparkan diatas. Hal ini sangat menguntungkan bagi aktor TAN dalam mencapai tujuannya karena aktor yang terlibat semakin banyak dan melibatkan banyak aktor lebih besar dengan *power* yang mereka miliki masing-masing.

Accountability Politics

Accountability Politics diartikan sebagai upaya aktor TAN dalam membuat para aktor yang berpengaruh agar tetap berada dalam prinsipnya. Dalam hal ini aktor tersebut seringkali memecah fokus dan membuat perhatian masyarakat banyak teralihkan. Hal ini

³⁰ Matthew Lippman, 1994, *The 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide : forty five years later*, International and Comparative Law Journal Vol.8 No. 1. Hlm. 344-348

tentunya akan berpengaruh dengan *moral leverage* jika terjadi dalam cakupan yang besar. Maksud penulis disini bukan berarti bukti adanya *leverage* akan hilang dan tercoret namun akan berdampak pada perkembangan sebuah fenomena kedepannya.

TAN menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan pemerintah dan aktor lain untuk mengungkap posisi mereka secara publik terhadap sebuah isu.³¹ Indikator *accountability* ini akan berguna jika aktor target telah menyetujui dan berkomitmen untuk mengubah kebijakan atau perilaku bahkan isu yang diadvokasikan.

Dalam melihat pola ECCHR yang bermain dengan pengadilan mungkin kita akan menilai sangat sulit mengidentifikasi *accountability*. Hal ini dikarenakan pengadilan akan tetap berjalan sesuai barang bukti dan bersifat netral. ECCHR hanya bisa terus melakukan dan mengikuti proses pengadilan secara keseluruhan. Namun, ECCHR bisa terus menyuarakan kepada aktor internasional seperti PBB yang telah berkomitmen untuk memberantas pelanggaran HAM di Suriah. Dengan *accountability* disini, permasalahan dan fokus terhadap fenomena Suriah akan selalu dibicarakan. *Accountability politics* disini dinilai tetap berhasil diwujudkan dengan tolak ukur adanya aksi demonstrasi, penyebaran tagar #Justice4Syria dan juga para aktor TAN yang terus-menerus membagikan pendapatnya mengenai permasalahan Suriah baik di halaman web organisasi mereka maupun akun pribadi media sosial.

Hal ini berbuah manis bagi aktor TAN pada awal tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada tanggal 14 Januari

2022, pengadilan Koblenz di Jerman menghukum seorang pejabat senior pemerintah Assad atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Suriah, yang bernama Anwar Raslan, dengan hukuman seumur hidup. Pengadilan memutuskan dia bersalah menjadi pelaku penyiksaan, 27 pembunuhan dan kasus kekerasan seksual dan kejahatan lainnya di Cabang al-Khatib. Sementara itu pada Februari 2021, pengadilan menghukum rekan Anwar Raslan, Eyad Al-Gharib, empat setengah tahun penjara karena membantu dan bersekongkol dalam 30 kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pemaparan keempat strategi yang digunakan oleh ECCHR dan aktor TAN lainnya telah terpenuhi. Kita dapat mengamati perkembangan advokasi mereka dalam mencari keadilan terhadap korban di Suriah. Keempat strategi tersebut telah sah dilaksanakan oleh ECCHR dan organisasi yang memiliki visi yang sama.

ECCHR dan aktor TAN lainnya telah sukses dalam menjalankan misinya jika ditinjau kinerjanya melalui Transnational Advocacy Network. Namun bukan berarti permasalahan SGBV di Suriah telah putus dan selesai karena SGBV adalah salah satu kejahatan yang memiliki efek jangka panjang buruk bagi para korbannya. Jika ditinjau dari segi pengungsi Suriah di Lebanon, mereka masih belum juga terlepas dari kekangan SGBV. Dalam kasus pengungsi Suriah di Lebanon, dilaporkan bahwa adanya kasus pelecehan seksual namun tidak dilaporkan ke pihak berwenang dikarenakan takut status izin tinggal mereka bermasalah.

Peraturan di Lebanon mengharuskan pengungsi Suriah untuk memiliki penyokong yang merupakan warganegara Lebanon demi

³¹ Keck and Sikkink, op.cit, hlm 22.

mendapatkan status pengungsi.³² Diharapkan adanya perluasan ruang kerja baik ECCHR ataupun organisasi lainnya untuk menangani permasalahan ini.

5. SIMPULAN

European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) sebagai *Inter Non-Governmental Organization (INGO)* yang ikut serta dalam menangani kasus SGBV di Suriah dapat dilihat perannya dalam meninjau pertimbangan dari jalur pengadilan dengan mengikuti perkembangan persidangan. Dengan menggunakan *Transnational Advocacy Networks (TAN)*, peran aktor tersebut dapat dilihat dari keempat indikator yang dikutip dari buku Keck dan Sikkink, yakni *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics* dan *accountability politics*. Upaya-upaya yang aktor TAN lakukan disini dinilai berhasil dan memberikan harapan baru untuk menangkap para pelanggar HAM berat di Suriah.

Information politics didapatkan oleh para aktor TAN melalui proses wawancara dengan individu terkait dan media membantu menyebarkan informasi tersebut. Media dengan publikasi dan jangkauan yang luas meliputi batas domestik dan internasional merupakan instrumen penting dalam *information politics* agar berjalan.

Sementara *symbolic politics* yang didapati dalam peran TAN dalam konteks Suriah dapat ditinjau dari adanya pameran di markas besar PBB yang isinya adalah foto-foto dari

Caesars Files Group dan dihadiri oleh banyak orang serta diliput oleh media. Selain itu, tagar #Justice4Syria sebagai simbol dukungan di sosial media mengenai kejadian di Suriah. Ada pula aksi demonstrasi yang dilakukan oleh International Conscience Movement. Demonstrasi ini dilakukan serentak dengan 110 negara lainnya di Dunia. Perwakilan dari setiap organisasi melakukan konferensi pers bersama dengan tema “*We are getting together for the freedom of captive women and children in Syria*”. Aksi ini dihadiri sekitar 10.000 wanita yang berunjuk rasa. Dan terakhir ada film dokumenter yang berjudul *Bringing Assad To Justice* yang memproyeksikan bagaimana para aktivis berusaha untuk mencari keadilan terhadap korban HAM yang terjadi dibawah rezim Bassar Assad.

Kemudian *leverage politics* dilakukan oleh aktor TAN dapat ditinjau dari adanya pelayangan surat panggilan oleh Jamil Hassan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman. Kemudian adanya kaitan dengan PBB ketika pameran Caesars Files dilakukan di markas besar PBB. Dan terakhir adalah pembentukan Komisi Penyelidikan Internasional Independen tentang republik Arab Suriah (UN Col Syria) oleh dewan HAM PBB. Sementara untuk *accountability politics* dapat dilihat dari berhasilnya keluar keputusan bersalah terhadap dua orang pejabat senior Suriah yang bernama Anwar Raslan dan Eyad Al-Gharib.

Seluruh bab di skripsi ini telah memaparkan peranan organisasi internasional ECCHR dalam menangani SGBV di Suriah dengan menggunakan *Transnational Advocacy Networks*. Dan menghasilkan kesimpulan bahwa upaya TAN ini telah berhasil mencapai misinya dengan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas.

³² Adinda Ayu Shabrina, 2018, *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon*, *Journal of International Relations* Vol. 4 No. 1. Hlm. 82.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barkin, Samuel L. 2006. *International Organization Theories and Institutions*. New York; Palgrave MacMillan.
- Bennet, Leroy. 1995. *International Organization, principle and issue*. Eaglewood, New Jersey.
- Cheever, Daniel S. dan H Field Haviland jr. 1967. *Organizing for Peace : International Organizations in World Affair*. New York: Houghton Mifflin.
- Heywood, Andrew. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Keck, Margaret E. and Kathryn Sikkink. 1998. *Activists beyond Borders ; Advocacy networks in international politics*. USA: Cornell University Press.
- Keck, Margaret E dan Kathryn Sikkink. 1999. *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*. USA: Blackwell Publishers .
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (12th, Cetaka ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Suhandjati, S. (2004). *Kekerasan terhadap istri*, Yogyakarta: Gama Media.
- Surakmat, Winarno.1968. *Pengantar Metodologi ilmiah*. Bandung: Badan Penerbit IKIP

Jurnal:

- Ilmi, Mella Fitriatul. 2019. *Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional*. *Juris-Diction* Vol. 2 No. 6.
- Kristiani, Ni Made Dwi. 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 7 No. 3.
- Lippman, Matthew. 1994. The 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide : forty five years later, *International and Comparative Law Journal* Vol.8 No. 1.
- Muti'ah, Siti.2012 "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?" *Jurnal CMES* Vol: 1.
- Shabrina, Adinda Ayu. 2018. *Peran United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Suriah Korban Sexual and Gender-based Violence (SGBV) di Lebanon*. *Journal of International Relations*. Vol. 4 No. 1
- Sulistyaningsih, E., & Faturochman. 2002. *Dampak sosial psikologis perkosaan*. *Buletin Psikologi*, Tahun X, No. 1, 9-23. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sumera, Marcheila. 2013. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan*. *Lex et Sociatis*. Vol.I No. 2.

Triwijati, Endah. 2007. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center.

Dokumen:

ECCHR. 2017. Photographs and data from the Caesar-File Group; Evidence of systematic torture in detention facilities of the Syrian intelligence services and military police

Human Rights Council. 2018. "I lost my dignity"; *Sexual and Gender-Based Violence in the Syrian Arab Republic*. sesi ke 37 dalam item agenda 4.

OECD Development Centre. 2012. *Social Institutions and Gender Index: Syria Discriminatory Family Code*. Dapat ditelusuri di: <http://genderindex.org/country/syrian-arab-republic>.

Swastika Chresna,Ridhana. 2012. "Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan Myanmar pada 1996-2001". Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga.

Sumber lainnya:

BBC. 2020. *Belarus Election: Opposition Disputes Lukashenko Landslide Win*. Dapat ditelusuri di <https://www.bbc.com/news/world-europe-53721410>.

Caglayan, Mustafa. 2015. , *Gruesome photos of torture from Syria on display at UN*. AA. Dapat ditelusuri di: <https://www.aa.com.tr/en/politics/gruesome-photos-of-torture-from-syria-on-display-at-un/68036>

Detik. 2020. *Aktivis Jerman Ajukan Rezim Suriah ke Pengadilan Atas Kekerasan Seksual*. Dapat ditelusuri di <https://news.detik.com/dw/d-5064865/aktivis-jerman-ajukan-rezim-suriah-ke-pengadilan-atas-kekerasan-seksual>.

DW. 2018. *Germany issues international arrest warrant for Syrian intelligence chief – reports*. Dapat ditelusuri di: <https://www.dw.com/en/germany-issues-international-arrest-warrant-for-syrian-intelligence-chief-reports/a-44132109>.

ECCHR. Dapat ditelusuri pada: <https://www.ecchr.eu>

Hagedorn, Elizabeth. 2020. *How a German court is trying to bring Syrian war criminals to justice*. Al-Monitor. Dapat ditelusuri di: <https://www.al-monitor.com/originals/2020/04/syria-war-crimes-trial-germany-damascus-prison.html#ixzz7LTIYUqN>.

Human Rights Watch. 2012. *Syria: Sexual Assault in Detention Security Forces Also Attacked Women and Girls in Raids on Homes*. Dapat ditelusuri di: <https://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention>.

- Paksoy, Murat. 2019. *Turkey; Rallies Held for Jailed Syrian women, children*. AA. Dapat ditelusuri di:
<https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-rallies-held-for-jailed-syrian-women-children/1413119>
- Reinl, James. 2017. The Syrian war crime suspects who could be brought to justice. Middle East Eye. Dapat ditelusuri di:
<https://www.middleeasteye.net/news/syrian-war-crime-suspects-who-could-be-brought-justice>.
- TRT World. 2019. *Istanbul hosting meeting on jailed Syrian women*. Dapat ditelusuri di:
<https://www.trtworld.com/turkey/istanbul-hosting-meeting-on-jailed-syrian-women-24300>.